

KETUA PENGAJILAN TINGGI AGAMA JAMBI

PERKARA PENGAJILAN AGAMA SE WILAYAH PENGAJILAN TINGGI AGAMA JAMBI

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGIMPLEMENATSIAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN

Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengharuskan seluruh pegawai pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengejutkan sistem informasi Penelusuran perkara (SIPP) versi 3.0-1 sebagai sarana penyelatan perkara, pemantauan kinerja dan keterbukaan informasi publik;

b. Bahwa dalam rangka mempercepat pengimplementasiannya sistem pengimplementasiannya perlu dilakukan tindakan yang berdampak pada kinerja dan kelayakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, perlu dibentuk Satuan Tugas pengimplementasiannya yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan b, maka perlu ditetapkan Lingkungan Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

d. Bahwa nama-nama yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini jambi;

Penyelesaian Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dianggap cukup dan layak menjalani anggota satuan tugas pengimplementasiannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini;

Menengagat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2009 Nomor 157,

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159,

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112,

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159,

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Tambaran Negara Republik Indonesia Nomor 112,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61,

6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepariwisataan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar PeLAYanan PenGadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman PeLAYanan PenGadilan;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jelangkungan Nomor 1352/DJA/HM.02.3/6/2016, tanggal 1 Juni 2016, tentang Memperbaiki versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama;
- Mempertahikan : 1. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016, tentang Implementasi Aplikasi SIPP Mempertahikan : KEPUTUSAN KETUA PENGAJUDIAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PEMERINTUKAN SATUAN TUGAS PENIMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PENGAJUDIAN TINGGI AGAMA JAMBI;

PERATAMA : Membentuk Satuan Tugas Pengimplementasi Sistem Informasi PENGAJUDIAN TINGGI AGAMA JAMBI;

MEMERINTUKAN SATUAN TUGAS PENIMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PENGAJUDIAN TINGGI AGAMA JAMBI Untuk mempersiapkan pengimplementasi sistem informasi PENGAJUDIAN TINGGI AGAMA JAMBI yang bersifat bersama-sama bagi seluruh pengadilan agama;

KEDUA : Satuan Tugas Pengimplementasi Sistem Informasi PENELUSURAN PENGAJUDIAN TINGGI AGAMA JAMBI atas pelindungan, Pengaruh, susunananya sebagai alat tafsir dalam peraturan dan keputusan;

KETIGA : Menetapkan uraian Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pengimplementasi sistem informasi PENGAJUDIAN TINGGI AGAMA JAMBI;

Keempat : Menyatukan baha surat keputusan ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan lampiran II keputusan ini;

Penyelesaian : Mengadakan pelaksanaan pelaksanaan Pengadilan Agama di Lingkungan Perkara di Lingkungan Pemerintukan Satuan Tugas Implementasi PENGAJUDIAN TINGGI AGAMA JAMBI sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;

Nomor W5-A/430/PP.00.1/3/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Perkara (SATGAS IMPLEMENTASI SIPP) Pengadilan Agama se Wilayah Pemerintukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Informasi PENGAJUDIAN TINGGI AGAMA JAMBI;

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :



Kepemparat : Keputusan ini berlaku sejak tanggall ditetapkan dan apabila dikeluarkan hari
ternyata terdapat kekeliruan atau terdapat perkembangannya terbalik, maka
akan dipertimbangkan mestinya;

Pelindung/Penasehat	1. Ketua Pengadilan Tinjggi Agama Jambi. 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinjggi Agama Jambi.	Drs. H. Habibullah, S.H.I. (PA Kuala Tungkal - Zona III) Syamsul Hadi, S.Ag. (PA Mura Tebo - Zona I)	Wakil Sekretaris Sekretaris Koordinator Anggota	I. Bidang Pengembangan Koordinator Anggota
Satuan Tuuga :	1. Dein Praja Kusuma, S.Kom., M.Si. (PA Ma. Bungo - Zona III) 2. Abdurrahman S.E. (PA Jambi - Zona I) 3. Husaini, S.Kom (PA Sarolangun - Zona III) 4. Sutopo, S.Komp (PA Banjko - Zona III) 5. Arif Mustaqim, S.H.I. (PA Sungai Penuh - Zona II) 6. Agustiar, Amdu. (PA Mura Tebo - Zona I) 7. Dedi Arizal, S.E. (PA Mura Sabak - Zona II)	I. Bidang Implementasi Koordinator Anggota	II. Bidang Implementasi Koordinator Anggota	III. Bidang Evaluasi dan Koordinator Anggota
III. Bidang Evaluasi dan Koordinator Anggota	Drs. H. Rusdi, M.H. (PA Jambi - Zona I) 1. Drs. Idwai Maris, M.H. (PA Sungai Penuh - Zona II) 2. Dahkir, S.Ag (PA Banjko - Zona III) 3. Izzami, S.Ag., M.H. (PA Mura Tebo - Zona I) 4. Vina Amrina (PTA Jambi) 5. Linda Wati, S.H.I. (PA Sungai Penuh - Zona III) 6. Mukholill (PA Mura Bulian - Zona I) 7. Rani Irvan, SH (PA Mura Bungo-Zona III)	III. Bidang Evaluasi dan Koordinator Anggota	III. Bidang Evaluasi dan Koordinator Anggota	III. Bidang Evaluasi dan Koordinator Anggota
III. Bidang Evaluasi dan Koordinator Anggota	Drs. H. Rusdi, M.H. (PA Jambi - Zona I) 1. Drs. Idwai Maris, M.H. (PA Sungai Penuh - Zona II) 2. Dahkir, S.Ag (PA Banjko - Zona III) 3. Izzami, S.Ag., M.H. (PA Mura Tebo - Zona I) 4. Vina Amrina (PTA Jambi) 5. Linda Wati, S.H.I. (PA Sungai Penuh - Zona III) 6. Mukholill (PA Mura Bulian - Zona I) 7. Rani Irvan, SH (PA Mura Bungo-Zona III)			

Tentang Susunan Satuan Tuuga Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinjggi Agama Jambi Nomor
(SATGAS SIPP) Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinjggi Agama Jambi

Ditetapkan di : Jambi
 Pada Tanggal : 24 Maret 2020
 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
 Dr. Ds. H. Rusdi Hermin, S.H., M.A.
 NIP. 1953091981031005

<p>V. Bidang Pengawasan</p> <p>Koordinator Anggota</p> <p>Seluruh Hakim Tinggi PTA Jambi (PTA Jambi)</p>	<p>Anggota</p> <p>1. Drs. Effizal. (PA Jambi - Zona I) 2. Suspawati, S.Ag. (PA Muara Sungo-Zona III) 3. Dra. Hj. Hasanah, S.H., M.H. (PA Ma. Sabak - Zona II) 4. Drs. H. Bismah, S.H.I (PA Muara Bulian - Zona III) 5. Zakaria Ashori, S.H.I, M.H. (PA Kuala Tunyakal - Zona II) 6. Hudori, S.Ag. (PA Muara Bulian - Zona I) 7. Ilyas, S.H.I. (PA Kuala Tunyakal - Zona II)</p>
<p>IV. Bidang Bimbingan dan Konsultasi</p> <p>Koordinator Anggota</p> <p>Asroti Amrin, S.H.I., M.H.I. (PA Sungai Penuh - Zona I)</p>	<p>Anggota</p> <p>1. Dra. Hj. Bainah (PA Muara Tebo - Zona I) 2. Drs. H. Mahyuda, M.A. (PA Bangko - Zona III) 3. Dra. Ma'ripah (PA Sungai - Zona II) 4. Imam Masduqi, S.Ag, SH, M.HES (PA Kuala Tunyakal - Zona II) 5. Koirik Agustian, S.H.I., M.H. (PA Sarolangun - Zona III) 6. Tri Wahyuni S.Kom, M.H. (PTA Jambi) 7. Widianiingsih, A.Md. (PTA Jambi)</p>